

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset Tetap)**

Menurut Anton Tan (2014:32) menyatakan bahwa:

“Aset merupakan sesuatu yang memiliki nilai atau berguna, dan suatu benda yang bernilai, yang dapat dijual untuk melunasi utang”.

Adapun pengertian Aset Tetap menurut Faiz Zamzami (2014:124) menyatakan bahwa:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”.

Sedangkan menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 28 dalam Sri Wahyuni (2020:8) menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian”.

Dari ketiga pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Aset yaitu meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **2.1.1.1 Indikator Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset Tetap)**

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 28 dalam (Sri Wahyuni, 2020:8) Pengelolaan aset tetap (Barang Milik Daerah) memiliki beberapa konsep, diantaranya:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, adalah kegiatan dari rincian kebutuhan asset daerah untuk menghubungkan pengadaan asset yang telah lalu dengan keadaan yang saat ini sedang berjalan untuk tindakan yang akan datang
- b. Pengadaan, harus mengikuti sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penggunaan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna asset dalam mengelola dan menatausahakannya yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- d. Pemanfaatan, adalah pendayagunaan asset daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan optimalisasi asset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- e. Pengamanan dan pemeliharaan, untuk aset tetap (Barang Milik Daerah) harus dikelola secara optimal, atau dilakukan pemantauan agar tertib secara hukum, administrasi, dan juga fisik
- f. Penilaian, dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap daerah. Dan penilaian tersebut diperuntukkan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah.
- g. Pemindahtanganan, adalah pengalihan kepemilikan asset daerah berupa penjualan, hibah, tukar menukar, dan penyertaan modal.
- h. Pemusnahan, adalah tindakan memusnakan fisik dan kegunaan asset daerahnya
- i. Penghapusan, adalah tindakan menghapus asset daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang.
- j. Penatausahaan dan pembinaan, adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan asset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Pengawasan dan pengendalian, untuk menjamin kelancaran dari penyelenggaraan pengelolaan aset tetap daerah secara berdayaguna.

### 2.1.2 Pengertian Pengendalian Intern

Pengertian dari pengendalian intern menurut COSO (2013) dalam Wakhyudi (2018:18) merupakan:

*“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance”.*

Menurut Marshall dan Paul (2016:226) menyatakan bahwa:

“Pengendalian intern adalah sebuah proses yang menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian dari integral dari aktivitas manajemen”.

Sedangkan Hery (2014:11) menuturkan bahwa:

“Pengendalian Intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan”.

Berdasarkan dari ketiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.2.1 Indikator Pengendalian Intern

Menurut COSO (2013) dalam Wakhyudi (2018:17) pengendalian intern memiliki beberapa komponen, diantaranya yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian, terdiri dari kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan tentang pengendalian internal.
- b. Penilaian Risiko, atas pelaporan keuangan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan. Serta dapat mempertimbangkan potensi dari *fraud* (kecurangan) dalam penilaian risiko atas pencapaian tujuan.
- c. Aktivitas Pengendalian, mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur (misalnya: Standar Operasi Perusahaan/SOP) untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalisir resiko atas pencapaian tujuan.
- d. Informasi dan Komunikasi, untuk memberikan informasi yang diperlukan para pegawai dalam melaksanakan, mengelola, mengendalikan semua kegiatan operasinya. Informasi yang dibutuhkan berupa informasi yang andal, relevan dan berkualitas baik.
- e. Pemantauan, berkaitan dengan evaluasi terhadap pengendalian intern secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen guna menentukan jika pengendalian tersebut sudah beroperasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dari hasil pemantauan itu dapat diketahui kelemahan pengendalian intern sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik.

### 2.1.3 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Hanafi dan Halim (2002:63) dalam Kariyoto (2017:163) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah:

“Laporan yang diharapkan bisa memberikan informasi terkait perusahaan dan dapat digabungkan dengan informasi yang lainnya, seperti industri, *economic condition*, bisa memberikan gambaran yang lebih baik tentang prospek dan risiko yang di hadapi oleh perusahaan”.

Pengertian laporan keuangan menurut Kasmir (2014:7) merupakan: “Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Sedangkan menurut Erlina (2015:19) kualitas laporan keuangan yaitu:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya”.

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan dari suatu transaksi ekonomi dari entitas akuntansi pada pemerintah yang akan dijadikan sebuah informasi dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

### **2.1.3.1 Indikator Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik. Berikut ini menurut Erlina (2015:8) karakteristik yang dimiliki oleh kualitas laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Andal, informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau disajikan secara wajar.
2. Relevan, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Karena hal ini dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Dapat dipahami, kualitas dari informasi yang disajikan harus dapat dipahami oleh pemakai. Dalam hal ini pemakai harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar.
4. Dapat dibandingkan, pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset Tetap) terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

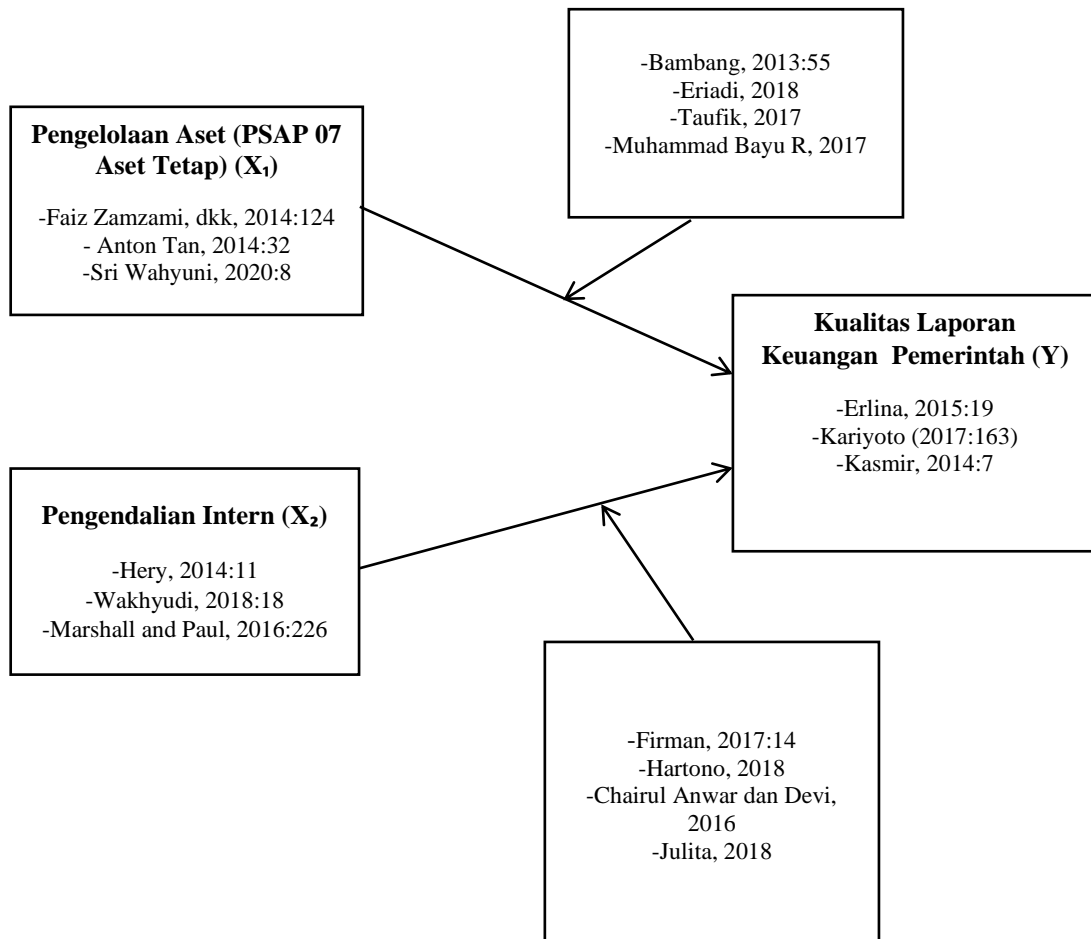
Pengelolaan aset yang baik dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Bambang, 2013:55).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Eriadi, 2018) menyatakan bahwa *Fixed asset have a positive effect on the quality of local government financial statements*. Hal yang sama dinyatakan oleh (Taufik, 2018) bahwa *asset management have a positive effect on the quality of financial statements*. Dan menurut (Muhammad Bayu R, 2017) hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan aset berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

### **2.2.2 Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Pada dasarnya pengendalian intern yang baik dapat terhindar dari adanya *fraud* (kecurangan) dan meningkatkan kelayakan dari laporan keuangan bagi pemerintah (Firman, 2017:14).

Sedangkan menurut peneliti sebelumnya yaitu (Chairul dan Devi, 2016) menyebutkan bahwa *The results of this study show that the internal control system affects the quality of financial statements*. Sementara itu, menurut (Julita, 2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *the internal control effect the quality of financial statements*. Dan hal yang sama diutarakan oleh (Hartono, 2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *the implementation of internal control system simultaneously and partially had positive and significant influence on the quality of financial statement*.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan dari kerangka pemikiran diatas, maka peneliti perlu dilakukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>:** Pengelolaan Aset (PSAP 07 Aset Tetap) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Cianjur.

**H<sub>2</sub>:** Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Cianjur.